



TAHUN LALU HABISKAN RP 30 MILIAR

Pemkot Belum Alokasikan Pengadaan Tanah

YOGYA (KR) - Pada tahun anggaran 2022, Pemkot Yogya belum akan mengalokasikan pembelian atau pengadaan tanah untuk publik. Hal ini seiring kebutuhan prioritas untuk pemulihan ekonomi di samping belum stabilnya anggaran akibat pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yogya Wahyu Handoyo, mengungkapkan meski belum ada pengadaan tanah namun peluangnya masih terbuka terutama pada perubahan anggaran. "Kita harapkan di perubahan nanti akan ada struktur anggaran yang lebih fleksibel, lebih leluasa. Sehingga kita bisa kembali melaksanakan pengadaan tanah," jelasnya, Jumat (7/1).

Pada tahun 2021 lalu, Pemkot Yogya menghabiskan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk pengadaan tanah. Masing-masing untuk ruang terbuka hijau di Ketanggungan Wirobrajan yang dialokasikan melalui

APBD murni, dan ruang terbuka di Prenggan serta calon Puskesmas Gondomanan melalui perubahan anggaran. Kegiatan paling besar ialah lahan di Jalan Ibu Ruswo untuk calon Puskesmas Gondomanan yang mencapai sekitar Rp 27 miliar. Hal ini selain tanah yang cukup luas, lokasinya juga strategis.

Wahyu mengungkapkan, sejauh ini proposal dari masyarakat yang menawarkan tanahnya untuk dibeli pemerintah masih menumpuk. Totalnya sekitar 80 proposal. Akan tetapi pihaknya belum bisa memastikan lahan mana yang diprioritaskan untuk dibeli. "Harus memilih dan memilah secara cermat. Misalnya dari penyebaran kewilayahannya. Kemudian dari sisi kebutuhan apakah untuk fasilitas umum atau ruang terbuka. Setelah itu dari sisi pengelolaan dan pemanfaatannya di kemudian hari," tandasnya.

Proposal yang diajukan oleh masyarakat tersebut sebagian besar un-

tuk ruang terbuka hijau publik yang ada di wilayah. Namun ada pula yang diajukan untuk fasilitas umum seperti ruang pertemuan warga atau Balai RW. Diakunya, peruntukan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat. Hanya untuk merealisasikannya harus mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah serta skala prioritas kebutuhan.

Menurut Wahyu, idealnya luas lahan yang dibeli pemerintah minimal 300 meter persegi. Dengan luasan tersebut pemanfaatannya nanti bisa lebih leluasa apakah untuk ruang terbuka hijau maupun fasilitas umum. Tapi tidak dipungkiri, mencari lahan seluas itu di Kota Yogya cukup sulit. Sementara tanah yang ditawarkan warga rata-rata kurang dari 300 meter persegi. "Harga tanah di kota kan juga tergolong tinggi. Meskipun itu di perkampungan, tidak berada di jalan protokol tapi nilai tanahnya tetap tinggi," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005